

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

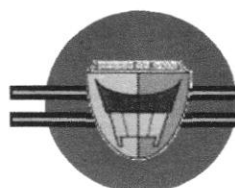
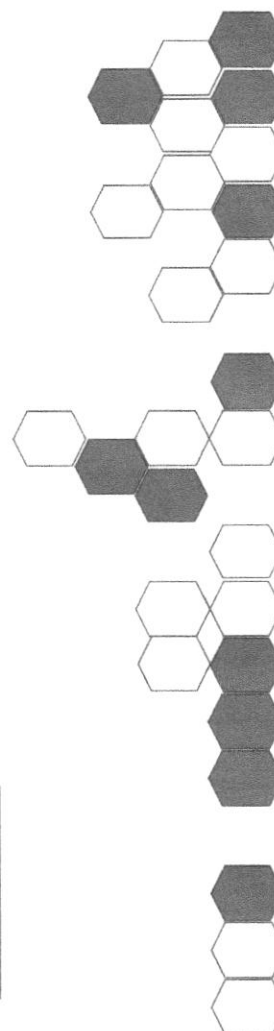
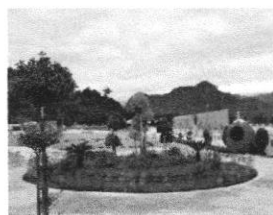
TAHUN 2023



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2023 ini dengan baik.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur Pengendalian Intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern yang ada dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkret bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Painan, Mei 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESIR SELATAN



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M.
NIP. 19720101 199701 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu instansi pemerintah yang mencakup kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik di Kabupaten Pesisir Selatan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian, melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai tone at the top (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan (6 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai

4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini

disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan dan pengawasan aparatur
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Sosialisasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
		Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai
		Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya
		Melaksanakan atau Mengikuti diklat/ pelatihan
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan)
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
V	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
VI	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama antar instansi yang terkait melalui rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari Inspektorat dan BPK

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2023, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan Pelayanan Dasar
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel dan Berkinerja

B. Hasil Identifikasi Risiko

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi risiko yang memungkinkan menghambat mencapai tujuan organisasi sesuai definisinya bahwa identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pengendalian pembangunan sehingga tercapainya tujuan organisasi. Maka berikut hasil identifikasi risiko terhadap kegiatan/subkegiatan tahun anggaran 2023 seperti pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Identifikasi Risiko Program/Kegiatan tahun anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Risiko
A	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Risiko
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Terhambatnya pembangunan bangunan perkuatan tebing
2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terhambatnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota
3	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Sungai
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terhambatnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Terhambatnya peningkatan jaringan irigasi permukaan
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Terhambatnya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Terhambatnya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Risiko
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Terhambatnya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3	Peningkatan SPAM Jaringan Irigasi	Terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Irigasi	Terhambatnya Peningkatan SPAM Jaringan Irigasi
4	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Tidak terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya SPAM Berbasis Masyarakat	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
6	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	Terhambatnya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
C PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terlaksananya pembangunan sub sistem pengolahan setempat	Terhambatnya pembangunan sub sistem pengolahan setempat
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayaninya Rumah Tangga Melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terhambatnya Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
D PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyusunan Rencana,	Tersusunnya Rencana,	Terhambatnya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Risiko
	Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	Terhambatnya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	Terhambatnya Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Terhambatnya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
E PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terhambatnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terhambatnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Terhambatnya Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Risiko
3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terhambatnya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
F PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Terhambatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan
3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terhambatnya Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
G PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Terhambatnya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Terhambatnya Pembangunan Jalan
3	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Terhambatnya Rehabilitasi Jalan
4	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Terhambatnya Rekonstruksi Jalan
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Terhambatnya Pemeliharaan Rutin Jalan
6	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Terhambatnya Pembangunan Jembatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Risiko
7	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Terhambatnya Rehabilitasi Jembatan
8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Terhambatnya Pemeliharaan Rutin Jembatan
H PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terhambatnya Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terhambatnya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota			
1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersusunya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terhambatnya Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terhambatnya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
2	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terhambatnya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
J PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	Pelaksanaan Persetujuan	Terlaksananya	Terhambatnya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Risiko
	Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terhambatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terhambatnya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

C. Analisis Risiko

Definisi analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besarnya dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Adapun analisis Risiko terhadap program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Analisis Risiko terhadap Pencapaian Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
A	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya pembangunan bangunan perkuatan tebing
2	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterlambatan Realisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
					Konstruksi	
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Ketelitian dalam pendataan	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Profesionalisme Aparatur	Terhambatnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya peningkatan jaringan irigasi permukaan
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Ketelitian dalam pendataan	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Profesionalisme Aparatur	Terhambatnya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
	Peningkatan SPAM Jaringan Irigasi	Terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Irigasi	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Peningkatan SPAM Jaringan Irigasi
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Ketelitian dalam pendataan	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Profesionalisme Aparatur	Tidak terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya SPAM Berbasis Masyarakat	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
4	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Faktor Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
2	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terlayannya Rumah Tangga Melalui Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kurang terlayannya jasa penyedotan lumpur tinja	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Terbatasnya sarana dan prasarana	Terhambatnya Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Ketelitian dalam pendataan	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Profesionalisme Aparatur	Terhambatnya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan	Terhambatnya Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
					Konstruksi	
3	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Meningkatnya Saluran Drainase Perkotaan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
E	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Keterlambatan Realisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Penilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
						Implementasi SIMBG
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Ketelitian dalam pendataan	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Profesionalisme Aparatur	Terhambatnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Terhambatnya Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota
3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
F	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan
3	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Femilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
		Lingkungan				
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Ketelitian dalam pendataan	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Profesionalisme Aparatur	Terhambatnya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pembangunan Jalan
3	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Rehailitasi Jalan
4	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Rekonstruksi Jalan
5	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan	Terhambatnya Pemeliharaan Rutin

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
					Konstruksi	Jalan
6	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pembangunan Jembatan
7	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Rehabilitasi Jembatan
8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Keterlambatan Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Terhambatnya Pemeliharaan Rutin Jembatan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						
1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Berkurangnya peserta pelatihan	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Berkurangnya peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota					
1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersusunya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terhambatnya Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Profesionalisme Aparatur	Terhambatnya Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					
1	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Berkurangnya peserta bimbingan teknis	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Keterlambatan Realisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perencanaan Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR	Keterlambatan Realisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,

Pelaksanaan Penilaian Risiko DPUTR Kab. Pessel Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Pencapaian Tujuan
	Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Berkurangnya peserta sosialisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Keterlambatan Realisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Keterlambatan Realisasi	Kepala Dinas, Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi sesama stakeholder	Terhambatnya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Untuk sub kegiatan yang bersifat perencanaan dan penyusunan serta non konstruksi dengan output dokumen dan orang, memiliki risiko antara lain :

- Ketelitian dalam pendataan yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme aparatur/ sumber daya manusia
- Keterlambatan realisasi yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait
- Berkurangnya jumlah peserta yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait
- Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

b. Untuk sub kegiatan yang bersifat konstruksi memiliki Risiko yaitu :

- Keterlambatan konstruksi yang disebabkan oleh bencana alam, cuaca buruk

Tabel 3.3 Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko terhadap Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Risiko	Dampak pada Capaian Tujuan	Risiko		Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor
			Dampak	Kemungkinan terjadi			
1	Ketelitian dalam pendataan	Terhambatnya penyusunan dokumen perencanaan, lingkungan	Tinggi	Kadang - Kadang	2	3	6
2	Keterlambatan realisasi	Terhambatnya penyusunan rekomendasi teknis, regulasi, serta penyusunan data dan informasi	Rendah	Kadang - Kadang	2	1	2

3	Berkurangnya jumlah peserta	Terhambatnya pelaksanaan pelatihan sertifikasi, sosialisai, dan bimbingan teknis	Sedang	Kadang - Kadang	2	2	4
4	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Terhambatnya pembangunan dan investasi	Tinggi	Kadang - Kadang	2	3	6
5	Keterlambatan konstruksi	Terhambatnya pembangunan, peningkatan, rekonstruksi serta pemeliharaan infrastruktur	Tinggi	Kadang - Kadang	2	3	6

Berdasarkan hasil analisis risiko di atas dapat digambarkan peta risiko berikut:

Tabel 3.4 Matriks Analisis Risiko

Kemungkinan		Dampak/Konsekuensi		
		Rendah	Sedang	Tinggi
	Sering			
	Kadang - Kadang			
	Jarang			

Dari matriks diatas dapat disimpulkan bahwa Risiko yang muncul adalah rendah (Risiko dapat diterima) serta sedang dan tinggi (Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Rendah (Risiko dapat diterima) yaitu:

- Keterlambatan realisasi dalam penerbitan rekomendasi teknis, regulasi, serta penyusunan data dan informasi

2. Sedang (Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan) yaitu :

- Berkurangnya jumlah peserta sosialisasi, seminar, pelatihan sertifikasi serta bimbingan teknis

3. Tinggi (Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan) yaitu :

- Kurangnya Ketelitian dalam pendataan untuk penyusunan dokumen perencanaan, dan dokumen lingkungan
- Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan dan investasi
- Keterlambatan konstruksi pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, serta pemeliharaan infrastruktur

D. Pengendalian Yang Sudah Dilaksanakan

Sampai saat ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan program dan kegiatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilaksanakan Tahun Anggaran 2023

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian Terpasang	Keterangan	
			Efektif	Kurang / Tidak Efektif
1	Ketelitian dalam pendataan	1. Meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis 2. Melakukan pengecekan hasil pendataan secara berjenjang	Efektif	
2	Keterlambatan realisasi	1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait 2. Penghimpunan data secara digital	Efektif	
3	Berkurangnya jumlah peserta	1. Finalisasi Penjaringan peserta disepakati H-1 2. Meningkatkan media informasi	Efektif	
4	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis 2. Pelaksanaan sosialisasi	Efektif	
5	Keterlambatan konstruksi	1. Percepatan pelaksanaan konstruksi 2. Inovasi konstruksi yang ramah bencana	Efektif	

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Untuk kegiatan yang bersifat perencanaan dan penyusunan serta non konstruksi dengan output dokumen dan orang, memiliki kegiatan pengendalian yang efektif sehingga sudah bisa mencapai tujuan
- b. Untuk sub kegiatan yang bersifat konstruksi memiliki kegiatan pengendalian yang efektif sehingga sudah bisa mencapai tujuan dan dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi

E. Rencana Tindak Pengendalian

Berdasarkan hasil evaluasi sementara terhadap kegiatan pengendalian yang sudah dilaksanakan diatas dan untuk meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi. maka disusun rencana tindak pengendalian yang masih dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Rencana Tindak Pengendalian yang masih dibutuhkan Tahun Anggaran 2023

No	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Perbaikan Pengendalian Yang dibutuhkan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan
1	Ketelitian dalam pendataan	Peningkatan Keahlian dan Profesional SDM	Kepala Dinas, Kepala Bidang
2	Keterlambatan realisasi	Melakukan monitoring setiap bulannya	Kepala Dinas, Kepala Bidang
3	Berkurangnya jumlah peserta	Mengkonformasi langsung kesediaan peserta sosialisasi, seminar, pelatihan, dan bimbingan teknis	Kepala Dinas, Kepala Bidang
4	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Melakukan Koordinasi antar bidang	Kepala Dinas, Kepala Bidang
5	Keterlambatan konstruksi	Koordinasi dengan stakeholderterkait	Kepala Dinas, Kepala Bidang

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Tabel 4.1. Rencana Informasi dan Komunikasi Pengendalian Tahun Anggaran 2023

No	Rencana Tindak Perbaikan Pengendalian	Media/ Sarana Komunikasi
1	Koordinasi dengan stakeholder terkait	Surat pemberitahuan pertemuan
2	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Surat pemberitahuan
3	Mengkonformasi langsung kesediaan peserta sosialisasi, seminar, pelatihan, dan bimbingan teknis	Surat undangan melalui aplikasi, wa group (<i>social media</i>)
4	Melakukan Koordinasi antar bidang	Asistensi, rapat pertemuan, surat edaran
5	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat	Surat edaran, iklan, surat pemberitahuan

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang telah dilaksanakan berjalan dengan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk melihat keberhasilan tindakan perbaikan yang telah dilakukan berupa Rapat Realisasi penyerapan anggaran dan Fisik Kegiatan.

Demikianlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen yang terus menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan kondisi terkini untuk penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen RTP ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Penilaian : 2023

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																				SIMPULAN		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	Modus	KUOSIONER CEE	
a	b	c																																				d		
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																																					KURANG		
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	2	3	3	4	2	2	3	2	3	3	4	2	4	2	2	4	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	4	4	2	4	3	MEMADAI	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	2	4	3	MEMADAI	
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3	2	3	4	1	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	4	3	2	4	2	3	2	3	4	3	2	3	3	4	2	2	3	MEMADAI	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	2	2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3	3	2	4	2	2	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	KURANG MEMADAI	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																																					KURANG		
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditetapkan	3	3	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3	3	2	4	3	2	2	3	3	4	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	MEMADAI	
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	3	3	1	3	2	KURANG MEMADAI	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	4	2	2	3	2	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	1	2	2	3	3	1	4	2	KURANG MEMADAI	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara bertahap	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	2	3	1	2	1	1	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	4	1	4	2	KURANG MEMADAI	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																																					KURANG		
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	3	2	3	1	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1	2	2	4	3	2	4	2	KURANG MEMADAI	
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4	1	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	KURANG MEMADAI	
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggalai pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	4	3	3	3	4	2	1	3	2	3	3	3	3	4	1	2	3	2	3	2	2	4	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4	3	4	2	3	2	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	MEMADAI

6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (sementara)	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	2	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	MEMADAI				
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	2	2	2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2	4	1	2	3	2	3	4	3	2	3	2	2	2	3	2	4	2	3	1	3	2	4	3	MEMADAI	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	2	2	2	4	2	2	3	3	3	3	2	3	1	2	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	4	3	4	4	2	KURANG MEMADAI	
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																													KURANG											
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	MEMADAI	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	4	2	4	2	4	2	3	4	3	4	4	2	KURANG MEMADAI	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	1	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	3	MEMADAI	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	4	2	3	2	3	3	1	2	3	2	3	2	3	3	3	4	4	2	4	2	KURANG MEMADAI	
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																													KURANG											
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	2	2	3	3	3	2	4	2	3	2	3	3	3	2	4	3	3	4	2	3	4	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	KURANG MEMADAI	
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	MEMADAI	
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	4	2	2	3	1	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2	3	2	KURANG MEMADAI
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																													KURANG											
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	2	3	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	2	4	3	MEMADAI	
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	1	4	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	3	4	3	2	3	3	MEMADAI	
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1	2	3	3	4	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	4	3	2	3	1	KURANG MEMADAI	
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	4	1	2	3	1	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	3	4	3	2	3	2	KURANG MEMADAI	
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	1	1	3	3	2	2	2	2	3	2	2	4	3	2	3	1	1	2	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	1	KURANG MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan instansi dan mengaikasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	4	1	3	4	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	2	4	3	3	4	3	MEMADAI	
7	Instansi telah mengaikasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	1	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	3	3	2	3	2	KURANG MEMADAI

G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																													KURANG													
1	Inspektorat Daerah melakukan revidu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program. Secara	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	1	3	4	2	3	3	4	2	2	4	4	3	4	3	MEMADAI	
2	Inspektorat Daerah melakukan revidu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	4	2	3	4	4	4	4	3	MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan	4	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	4	1	3	2	3	3	4	3	2	2	3	4	3	3	3	3	4	3	2	4	4	4	4	4	3	MEMADAI	
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	2	3	2	3	2	3	3	2	4	3	4	3	2	4	2	3	4	2	3	4	4	2	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	2	KURANG MEMADAI		
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	4	4	4	3	3	MEMADAI		
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																													MEMADAI													
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	MEMADAI				
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pememriksaan	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	MEMADAI				

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, taj
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal: kesimpulan tiap pertanyaan : "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 2023	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa (PROYEK PEMBANGUNAN TPA TAHUN ANGGARAN 2021 SENILAI RP 22 MILIAR DI BUKIT BUAI TAPAN PESISIR SELATAN TERBENGKALAI)	-Program kegiatan belum berjalan optimal dengan ditemukannya pekerjaan PUTR belum terselesaikan	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
2	Media Massa	- Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
3	LHP AK/INSP/2022	Pajak daerah berupa PMBLB sejumlah Rp. 831.000 belum dipungut dan disetor ke KAS Daerah	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan : 2023					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi tentang penegakan integritas dan nilai etika sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian masih dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal
2	Komitmen terhadap kompetensi	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi tentang komitmen terhadap kompetensi sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal dengan skor 4
3	Kepemimpinan yang kondusif	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi tentang Kepemimpinan yang kondusif sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal dengan skor 4

4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi tentang Struktur organisasi sesuai kebutuhan sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal dengan skor 4
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi tentang Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal dengan skor 4
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi tentang Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal dengan skor 4
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi tentang Perwujudan peran APIP yang efektif sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal dengan skor 4

8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	Memadai	3	Memadai	Memadai	Berdasarkan hasil revidu dokumen dan hasil survei persepsi tentang Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait sudah sesuai antara kondisi saat ini dengan hasil survey. Hanya saja hasil penilaian dengan skor 3, belum mencapai angka maksimal dengan skor 4
---	---	---	---------	---	---------	---------	--

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian	2023
Periode yang dinilai	
Sumber Data	RPJMD Tahun 2021-2026
Visi	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional
Misi Strategis RPJMD	1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat 3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah. 4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
Penetapan konteks Misi	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah
Tujuan Strategis RPJMD	1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi 2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan 2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan 3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan 4.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat 5.1 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas. 5.2 Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing 6.2 Terciptanya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan
Sasaran RPJMD	3.1.4 Meningkatkan kualitas infrastruktur
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	3.1.4 Meningkatkan kualitas infrastruktur

IKU Sasaran RPJMD	-Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik -Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) -Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten -Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	-Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik -Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) -Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten -Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik
Prioritas pembangunan dan program unggulan	-PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN -PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM -PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH -PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Urusan Pemerintahan	Urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan
	Dinas Pendidikan
	Dinas Perkimtan LH
	Pemerintahan Nagari
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan Sasaran: Meningkatkan kualitas infrastruktur IKU: Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan proporsi lahan sawah beririgasi baik Program: Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah kabupaten pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat		
Tahun Penilaian	2023		
Periode yang dinilai	Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang		
OPD yang Dinilai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas PUTR Kab. Pesisir Selatan		
Tujuan Strategis	3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan		
Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas infrastruktur		
IKU Renstra OPD		IKU	2023
	1	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik	32.9
	2	Proposi lahan sawah beririgasi baik	60.75
	3	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab / Kota	43.44
	4	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan Pantai di WS Kewenangan Kab / Kota	29.8
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	62.6
	5	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	97.87
	6	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77.48
	7	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	87.65
	8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	42.61
		Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	57.08
	9	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	Belum Ada

Informasi lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	"Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan Sasaran: Meningkatkan kualitas infrastruktur IKU: Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan proporsi lahan sawah beririgasi baik Program: Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air"	
	Kabupaten Pesisir Selatan, Mei 2023 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Devitra Syamsunardini, S.T., M.M NIP. 19720101 199701 1 001	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	Pemerintah kabupaten pesisir selatan, Provinsi Sumatera Barat	
Tahun Penilaian	2023	
Periode yang dinilai	Periode RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang	
OPD yang Dinilai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas PUTR Kab. Pesisir Selatan	
Tujuan Strategis	3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	
Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Renja 2020) dan Kegiatan Utama	-PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen
	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen
	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM
	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1 KM
	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM
	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0 KM
	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1 KM
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	-PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Kabupaten Pesisir Selatan, Mei 2023 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Devitra Syamsunardini, S.T., M.M NIP. 19720101 199701 1 001	

**Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda Nama OPD Tahun Penilaian Periode yang dinilai Urusan Pemerintahan		Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023 Periode RPJMD 2021-2026 Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan Sasaran: Meningkatkan kualitas infrastruktur IKU: Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan proporsi lahan sawah beririgasi baik Program: Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Tingkat Kemantapan Jalan	1. Rendahnya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan menurunnya kondisi infrastruktur jalan	RSP.22.01.02.01	Kepala Daerah	Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan, sehingga pelaksanaan tugas – tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat	Internal	c	pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan rendah	Kepala Daerah Masyarakat Dinas PUTR
		Proporsi lahan sawah beririgasi baik	1. Turunnya produktivitas pertanian	RSP.22.01.02.02	Kepala Daerah	Belum cukupnya regulasi daerah yang mengatur tentang irigasi dan kelembagaannya.	Internal	c	Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian	Kepala Daerah Masyarakat Dinas PUTR

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan								
Nama OPD		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Tahun Penilaian		2023								
Periode yang dinilai		Periode RPJMD 2021-2026								
Tujuan Strategis		Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		Urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang								
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis Pemda 3: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik	1. Jalan rusak akibat bencana alam	RSO.22.01.01	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Eksternal	C	Target Presentase Jalan Kondisi Baik tidak tercapai	Dinas PUTR Masyarakat
	Sasaran Strategis Pemda: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	1. Turunnya Indeks tanaman padi	RSO.22.01.02	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Eksternal	C	Target Proporsi Lahan sawah beririgasi baik tidak tercapai	Dinas PUTR, Masyarakat, Dinas Pertanian
	Program: Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan									
Nama OPD		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Tahun Penilaian		2023									
Periode yang dinilai		Periode RPJMD 2021-2026									
Tujuan Strategis		Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan									
Sasaran strategis OPD		Meningkatkan kualitas infrastruktur									
Urutan Pemerintahan		Urutan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang									
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	Kesepakatan Kontrak	Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak	ROO.22.02.01	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	Pekerjaan berjalan lambat	Internal	c	Penundaan pelunasan kontrak	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat
			Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.02.02	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	Dokumentasi SPJ terlambat dilengkapi oleh bidang terkait	Internal	c	Pekerjaan tidak dapat segera diselesaikan	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat
			Pelaporan	Kesulitan dalam rekapitulasi laporan realisasi fisik/realisasi keuangan	ROO.22.02.03	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	SPJ yang disampaikan tidak lengkap	Internal	c	Dana DAK tidak tersalurkan oleh Kemenkeu	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat
			Pemantauan dan Evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan selama kegiatan berjalan	ROO.22.02.04	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	Monitoring dan evaluasi hanya sebatas outcome	Internal	c	Anggaran tidak terserap 100%	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat
2	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	Luas lahan sawah beririgasi baik	Kesepakatan Kontrak	Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak	ROO.22.02.05	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	Pekerjaan berjalan lambat	Internal	c	Penundaan pelunasan kontrak	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat
			Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.22.02.06	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	Dokumentasi SPJ terlambat dilengkapi oleh bidang terkait	Internal	c	Pekerjaan tidak dapat segera diselesaikan	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat
			Pelaporan	Kesulitan dalam rekapitulasi laporan realisasi fisik/realisasi keuangan	ROO.22.02.07	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	SPJ yang disampaikan tidak lengkap	Internal	c	Dana DAK tidak tersalurkan oleh Kemenkeu	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat

			Pemantauan dan Evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan selama kegiatan berjalan	ROO.22.02.08	Kepala dinas PUTR/ Kepala Bidang	Monitoring dan evaluasi hanya sebatas outcome	Internal	c	Anggaran tidak terserap 100%	Kepala Daerah Kepala Dinas Masyarakat
--	--	--	-------------------------	--	--------------	----------------------------------	---	----------	---	------------------------------	---

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine,

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Tahun Penilaian	2023				
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara berkelanjutan				
Urusan Pemerintahan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala	Skala	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
1	Rendahnya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan menurunnya kondisi infrastruktur jalan	RSP.22.01.02.01	4	4	16
2	Turunnya produktivitas pertanian	RSP.22.01.02.02	4	3	12
II	Risiko Strategis OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan				
1	Jalan rusak akibat bencana alam	RSO.22.01.02.01	4	3	12
2	Turunnya Indeks tanaman padi	RSO.22.01.02.02	4	4	16
III	Risiko Operasional OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan				
1	Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak	ROO.22.01.02.01	3	3	9
2	Pertanggung jawaban tidak tepat waktu	ROO.22.01.02.02	3	2	6
3	Kesulitan dalam menetapkan target Laporan realisasi fisik	ROO.22.01.02.03	2	2	4
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan selama kegiatan berjalan	ROO.22.01.02.04	3	2	6

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kurang Signifikan	Signifikan	Sangat signifikan
	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan	3				
	Kemungkinan	2				
	Sangat	1				
Keterangan :			Rendah	Risiko dapat diterima		
			Sedang dan Tinggi	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya		
			Sangat	Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas		

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik/Sangat Signifikan
1	Sangat	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Tahun Penilaian	2023					
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara berkelanjutan					
Urusan Pemerintahan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
1	Rendahnya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan menurunnya kondisi infrastruktur jalan	RSP.22.01.02.01	16	Kepala Daerah	Masih kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan, sehingga pelaksanaan tugas – tugas pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi lambat	memenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan rendah
2	Turunnya produktivitas pertanian	RSP.22.01.02.02	12	Kepala Daerah	Belum cukupnya regulasi daerah yang mengatur tentang irigasi dan kelembagaannya.	Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian
II	Risiko Strategis OPD					
1	Jalan rusak akibat bencana alam	RSO.22.01.02.01	12	Kepala Dinas	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Target Presentase Jalan Kondisi Baik tidak tercapai
2	Turunnya Indeks tanaman padi	RSO.22.01.02.02	16	Kepala Dinas	Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Target Proporsi Lahan sawah beririgasi baik tidak tercapai
III	Risiko Operasional OPD : Dinas					
1	Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak	ROO.22.01.02.01	9	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Pekerjaan berjalan lambat	Penundaan pelunasan kontrak
2	Pertanggung jawaban tidak tepat waktu	ROO.22.01.02.02	6	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Dokumentasi SPJ terlambat dilengkapi oleh bidang terkait	Pekerjaan tidak dapat segera diselesaikan
3	Kesulitan dalam menetapkan target Laporan realisasi fisik	ROO.22.01.02.03	4	Kepala Dinas/Kepala Bidang	SPJ yang disampaikan tidak lengkap	Dana DAK tidak tersalurkan oleh Kemenkeu
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan selama kegiatan berjalan	ROO.22.01.02.04	6	Kepala Dinas/Kepala Bidang	Monitoring dan evaluasi hanya sebatas outcome	Anggaran tidak terserap 100%

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilaian : 2023

No.	Kor.disi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	Mengadakan Rapat Internal OPD untuk membahas pemahaman nilai etika dan kode Etik	Kepala OPD	Triwulan 2
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Mengusulkan nomor telepon aduan kepada masyarakat pelanggaran kode etik	Kepala Daerah	Triwulan 3
3	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	Surat Teguran pelanggaran Kode Etik	Kepala OPD	Triwulan 2
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	Akan mengusulkan anggaran untuk melaksanakan seminar bagi seluruh pegawai dan diklat untuk beberapa pegawai yang berminat dan memenuhi syarat	Kepala OPD	Triwulan 2
III	Kepemimpinan yang kondusif			
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	Rapat internal pembahasan pengelolaan resiko	Kepala OPD	Triwulan 1
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Rapat internal pembahasan pengelolaan resiko dengan mengundang tenaga ahli dari OPD terkait	Kepala OPD	Triwulan 3

3	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	Rapat internal pembahasan pengelolaan resiko dengan mengundang tenaga ahli dari OPD terkait	Kepala OPD	Triwulan 3
IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	Rapat internal pembahasan pengelolaan resiko	Kepala OPD	Triwulan 1
V Perwujudan Peran APIP yang Efektif				
1	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	Berkonsultasi dengan OPD lain yg terkait, perihal rekrutmen, mutasi dan peningkatan SDM pegawai untuk pemenuhan Kebutuhan SDM dalam OPD	Kepala OPD	Triwulan 2
	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	Rapat internal pembahasan pengelolaan resiko dengan mengundang tenaga ahli dari OPD terkait	Kepala OPD	Triwulan 3
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Rapat internal pembahasan pengelolaan resiko dengan mengundang tenaga ahli dari OPD terkait	Kepala OPD	Triwulan 3
	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Akan mengusulkan anggaran untuk melaksanakan seminar bagi seluruh pegawai dan diklat untuk beberapa pegawai yang berminat dan memenuhi syarat	Kepala OPD	Triwulan 2

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Kabupaten Pesisir Selatan						
Tahun Penilaian	: 2023						
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara berkelanjutan						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Rendahnya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan menurunnya kondisi infrastruktur jalan	RSP.22.01.02.01	Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030	Sosialisasi tentang kebijakan pembangunan infradstruktur khususnya pada pekerjaan umum dan pentaan ruang tidak optimal	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Bupati dan tim TAPD	2023
2	Turunnya produktivitas pertanian	RSP.22.01.02.02	Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Pembentukan balai peyuluhan pertanian	Sosialisasi tentang peningkatan produktivitas pertanian kebijakan pembangunan khususnya pada pekerjaan umum dan pentaan ruang tidak optimal	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Bupati dan tim TAPD	2023
II	Risiko Strategis						
1	Jalan rusak akibat bencana alam	RSO.22.01.02.01	Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17.PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Data Titik Referensi Jalan	Banyak nya jalan yang rusak akibat bencana alam	Perlunya percepatan pendataan kondisi jalan	Kepala Dinas/ Kepala Bidang	2023

2	Turunnya Indeks tanaman padi	RSO.22.01.02.02	Permen PUPR Nomor 30/PRT/M./2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Tehambatnya pengelolaan sistem irigasi	Butuhnya koordinasi dengan dinas Pertanian	Kepala Dinas/ Kepala Bidang	2023
iii	Risiko Operasional						
	Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak	ROO.22.01.02.01	Perjanjian Kontrak dengan Stakeholder	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	butuh percepatan penanganan	PPK/PPTK	2023
	Pertanggung jawaban tidak tepat waktu	ROO.22.01.02.02	Evaluasi dan monitoring	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	butuh percepatan penanganan	PPK/PPTK	2023
	Kesulitan dalam menetapkan target Laporan realisasi fisik	ROO.22.01.02.03	Evaluasi dan monitoring	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	butuh percepatan penanganan	PPK/PPTK	2023
	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan selama kegiatan berjalan	ROO.22.01.02.04	Evaluasi dan monitoring	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	butuh percepatan penanganan	PPK/PPTK	2023

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP

Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		Kabupaten Pesisir Selatan					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara berkelanjutan					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, rakor	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	Februari 2023		
2	Perlunya percepatan pendataan kondisi jalan	Forms Survei kondisi jalan	PPTK/PPK	Masyarakat dan Pihak Terkait	Maret 2023		
3	Butuhnya koordinasi dengan dinas Pertanian	Tatap Muka dan MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	Maret 2023		
4	butuh percepatan penanganan	Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, MOU	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Seluruh staf terkait, Kepala OPD/sekretaris	Maret 2023		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		Kabupaten Pesisir Selatan				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara berkelanjutan				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
No	Kegiatan Pengendalian	Bentuk/Metode	Penanggung Jawab	Rencana Waktu	Realisasi Waktu	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Rapat Tatap muka/ Online	Bupati, Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Februari 2023		
2	Perlunya percepatan pendataan kondisi jalan	Tatap muka	PPTK/PPK	Maret 2023		
3	Butuhnya koordinasi dengan dinas Pertanian	Tatap muka	Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Maret 2023		
4	butuh percepatan penanganan	Tatap muka	Kepala OPD, Sekretaris, PPTK	Maret 2023		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda		Kabupaten Pesisir Selatan								
Tahun Penilaian		: 2023								
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara berkelanjutan								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1	Rendahnya aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan dan menurunnya kondisi infrastruktur jalan	RSP.22.01.02.01		kurangnya dukungan sarana peralatan kebinamargaan, sehingga pelaksanaan tugas – tugas pemeliharaan jalan jembatan menjadi lambat	pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan rendah		SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Februari 2023		
2	Turunnya produktivitas pertanian	RSP.22.01.02.02		Belum cukupnya regulasi daerah yang mengatur tentang irigasi dan kelembagaannya.	Terjadinya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun/non pertanian		SOP Pengadaan, Renja, Renstra	Februari 2023		
Masalah/Risiko Baru:										
II Risiko Strategis Dinas										
1	Jalan rusak akibat bencana alam	RSO.22.01.02.01		Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Target Presentase Jalan Kondisi Baik tidak tercapai		Perlunya percepatan pendataan kondisi jalan	Maret 2023		
2	Turunnya Indeks tanaman padi	RSO.22.01.02.02		Bencana alam, Cuaca buruk, Kelalaian Pelaksanaan Konstruksi	Target Proporsi Lahan sawah beririgasi baik tidak tercapai		Butuhnya koordinasi dengan dinas Pertanian	Maret 2023		
Masalah/Risiko Baru:										
III Risiko Operasional										
1	Pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang disepakati pada kontrak	ROO.22.01.02.01		Pekerjaan berjalan lambat	Penundaan pelunasan kontrak		Percepatan Penanganan	Maret 2023		

2	Pertanggung jawaban tidak tepat waktu	ROO.22.01.02.02		Dokumentasi SPJ terlambat dilengkapi oleh bidang terkait	Pekerjaan tidak dapat segera diselesaikan		Percepatan Penanganan	Maret 2023		
3	Kesulitan dalam menetapkan target Laporan realisasi fisik	ROO.22.01.02.03		SPJ yang disampaikan tidak lengkap	Dana DAK tidak tersalurkan oleh Kemenkeu		Percepatan Penanganan	Maret 2023		
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan selama kegiatan berjalan	ROO.22.01.02.04		Monitoring dan evaluasi hanya sebatas outcome	Anggaran tidak terserap 100%		Percepatan Penanganan	Maret 2023		
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan